

BAB I

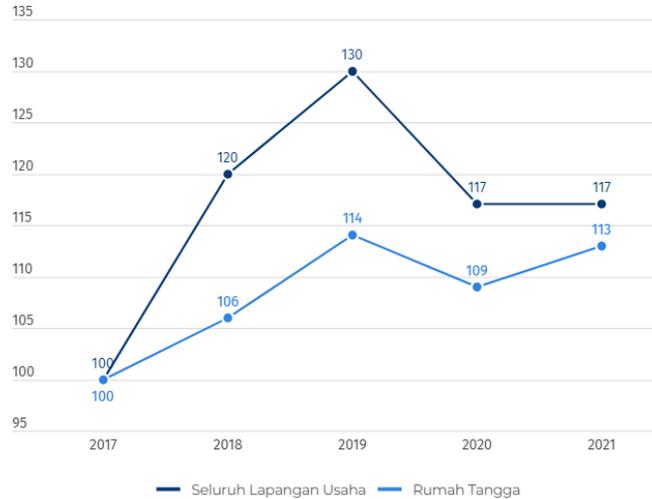
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi global yang tidak berkelanjutan terlihat dalam degradasi lingkungan dan penurunan kualitas hidup manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dan tidak memperhatikan lingkungan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, kerusakan lingkungan, dan penurunan sumber daya alam (Arifina et al., 2022). Hal ini berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang rusak dan buruknya kualitas hidup manusia juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lingkungan yang tercemar dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan biaya kesehatan, yang pada akhirnya menimbulkan beban ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Nopiana et al., 2022).

Emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO₂), mengancam terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Kondisi ini berpotensi memperburuk lingkungan hidup dan mengancam kesehatan serta masa depan manusia di Bumi. Pemanasan global dapat menyebabkan penipisan lapisan atmosfer dan kenaikan suhu bumi, yang berdampak pada naiknya permukaan air laut. Hal tersebut dapat mengurangi wilayah daratan dan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan, krisis pangan, serta penyebaran penyakit tropis. Selain itu, peningkatan suhu juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan

menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati karena tumbuhan dan hewan sulit beradaptasi (Nopiana et al., 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 1. 1 Indeks Emisi CO2 dari Penggunaan Energi (2017=100), 2017-2021

Data diatas menjelaskan bahwa emisi karbon dari penggunaan energi oleh sektor rumah tangga memiliki pola yang serupa. Selama tahun 2017-2021, emisi karbon dioksida sector rumah tangga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebelum kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Hingga tahun 2021, peningkatan karbon dioksida dari penggunaan energi sejak tahun 2017 yang dilepaskan oleh sector lapangan usaha senantiasa lebih tinggi daripada sector rumah tangga. Selama kurun waktu empat tahun tersebut, emisi karbon dioksida sector lapangan usaha meningkat sebesar 17 persen sedangkan peningkatan emisi karbon dioksida sector rumah tangga hanya sebesar 13 persen.

Surat Al-Baqarah Ayat 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya:

"Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."

Ada upaya nasional dan internasional yang serius dalam menciptakan strategi ramah lingkungan (*green strategy*) di bidang energi, yang tertuang dalam Protokol Kyoto. Kesepakatan diplomatik ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂), yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Emisi karbon yang dimaksud berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk mendapatkan energi, sehingga ada target bagi negara-negara industri besar untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil tersebut.

Indonesia turut aktif dalam upaya mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mencegah peningkatan emisi, sebagaimana tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. NDC Indonesia yang terbaru telah disampaikan ke UNFCCC pada Juli 2021. Indonesia juga memiliki peta jalan menuju netral karbon tahun 2060 atau lebih cepat sesuai strategi jangka panjang untuk rendah karbon dan ketahanan iklim. Perjanjian Paris telah diratifikasi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Selain kebijakan yang merespons perubahan iklim, ada pula kebijakan lain terkait sumber daya manusia yang diharapkan dapat mendukung kontribusi Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan, pembangunan rendah karbon untuk mencapai target *net zero emission* pada tahun 2060. Kebijakan sumber daya manusia ini juga mencakup bidang-bidang pembangunan yang tercantum dalam NDC, meliputi emisi

dari energi, limbah, industri pengolahan (*industrial processing and product use/IPPU*), pertanian, dan kehutanan. Peta jalan di bidang energi termasuk upaya yang diperlukan dari sisi permintaan untuk mendukung transisi energi, seperti penggunaan kompor listrik, lampu LED, dan gas kota (Investor, 2021).

Pengembangan ekonomi hijau merupakan solusi yang efektif untuk memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Ekonomi hijau merupakan model ekonomi yang menekankan pada pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan konsekuensi lingkungan dan sosial dari setiap kegiatan ekonomi. Hal ini memungkinkan perbaikan lingkungan dan memastikan pembangunan berkelanjutan memberikan manfaat tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan menggunakan sumber daya dan teknologi yang bertanggung jawab, pengembangan ekonomi hijau dapat memastikan pembangunan berkelanjutan mencapai kemajuan ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan manusia (Rahmayani et al., 2022).

Menurut penelitian sebelumnya oleh Muhkamat Anwar (2022), penerapan ekonomi hijau mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional serta mengatasi permasalahan di bidang multilateral. Ekonomi hijau juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan yang sehat dan membentuk ekosistem yang tepat untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Berdasarkan studi Kementerian PPN/Bappenas, akibat dampak perubahan iklim, Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 115 triliun pada tahun 2024.

Dengan menerapkan intervensi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sesuai RPJMN 2020-2024, potensi kehilangan ekonomi akibat perubahan iklim dapat berkurang hingga 50,4 persen menjadi Rp 57 triliun pada 2024. Kebijakan ini memprioritaskan lima sektor, yaitu penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan berkelanjutan. Selain itu, untuk mencapai target *net zero emission* pada 2060, Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp 77.000 triliun hingga 2060 atau setara 5 kali lipat dari PDB Indonesia di 2020.

Ekonomi hijau menjadi solusi yang strategis dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, karena mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang komprehensif perlu dilakukan untuk mengevaluasi langkah-langkah kebijakan yang telah diambil, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat guna. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi sektor ekonomi tertentu yang dapat dikembangkan dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, transportasi publik, serta industri manufaktur ramah lingkungan menjadi fokus penting dalam upaya mencapai target netral karbon.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyusun kebijakan yang efektif serta merumuskan strategi

pengembangan ekonomi hijau di Indonesia untuk mencapai target netral karbon tahun 2060, yang pada akhirnya akan membawa manfaat baik bagi lingkungan, masyarakat, maupun perekonomian secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran kebijakan-kebijakan ekonomi hijau Indonesia dalam mencapai sasaran netral karbon tahun 2060. Dalam konteks ini, penelitian akan fokus pada:

1. Bagaimana Kesiapan Indonesia dalam mencapai target netral karbon 2060 dan transisi ekonomi hijau?
2. Bagaimana isi/substansi, faktor determinan utama dan dampak Kebijakan Ekonomi Hijau di Indonesia?
3. Bagaimana Prioritas kebijakan dan peta jalan transisi ekonomi hijau menuju netral karbon 2060?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis Kesiapan Indonesia dalam mencapai target netral karbon 2060 dan transisi ekonomi hijau.
2. Menganalisis isi/substansi, faktor determinan utama dan dampak Kebijakan Ekonomi Hijau di Indonesia.
3. Menganalisis Prioritas kebijakan dan transisi ekonomi hijau menuju netral karbon 2060.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kebijakan-kebijakan ekonomi hijau dalam mencapai sasaran netral karbon di Indonesia.
2. Memberikan informasi kepada pemerintah, lembaga nirlaba, dan sektor swasta tentang pentingnya kebijakan ekonomi hijau dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
3. Menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau di Indonesia.